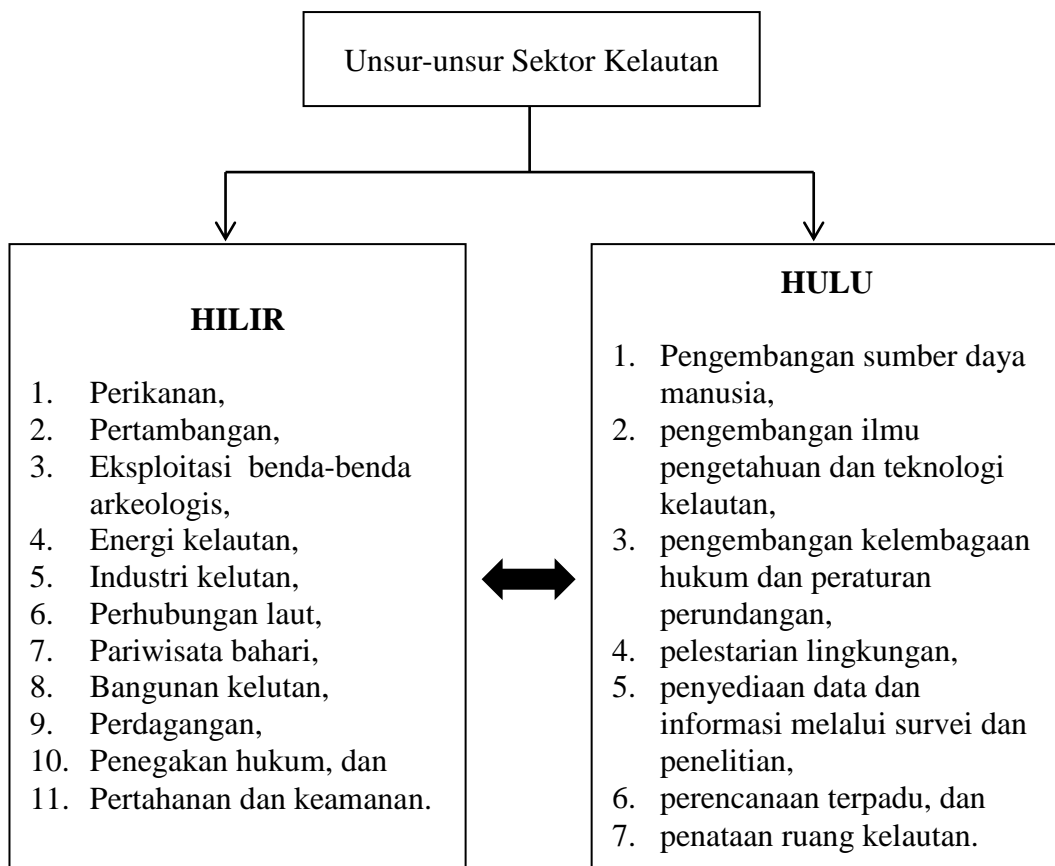


II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Unsur Sektor Kelautan

Menurut Budiharsono (2011), sektor kelautan merupakan sektor yang mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan dan kegiatan penunjangannya secara berkelanjutan. Sektor kelautan mencakup dua unsur yang satu sama lain saling terkait, yaitu: (1) unsur hilir yang lebih berkaitan dengan eksploitasi benda-benda arkeologis, energi kelautan, industri kelautan, perhubungan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, perdagangan, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan; dan (2) unsur hulu yang lebih berkaitan dengan eksplorasi yang merupakan pendukung unsur hilir yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, pengembangan kelembagaan hukum dan peraturan, pelestarian lingkungan, penyediaan data dan informasi melalui survei dan penelitian, keterpaduan perencanaan dan penataan ruang kelautan. Secara sistematis unsur-unsur sektor kelautan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Unsur-unsur sektor kelautan

Sumber: Budiharsono, 2001

2. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang didasarkan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Cakupan dalam statistik perikanan meliputi kegiatan ekonomi dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui kegiatan usaha perikanan (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2006).

3. Jenis Usaha Perikanan

Didalam dunia usaha perikanan dikenal 3 jenis bidang usaha, yaitu usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya atau akuakultur serta usaha perikanan pengolahan. Masing-masing jenis bidang usaha ini mempunyai karakteristik operasional produksi tersendiri yang akan berpengaruh langsung terhadap munculnya berbagai jenis biaya. Berdasarkan sifatnya, secara umum biaya usaha terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya investasi, biaya tetap serta biaya variabel. Berikut ini adalah uraian mengenai bentuk-bentuk pengeluaran yang terdapat di ketiga jenis bidang usaha perikanan:

a. Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas).

b. Usaha Perikanan Budidaya atau Akuakultur

Usaha perikanan budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang terkontrol serta berorientasikan kepada keuntungan. Contoh: budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain.

c. Usaha Perikanan Pengolahan

Usaha perikanan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan

tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur. Selain itu, kegiatan usaha ini juga bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ini ke pasar dengan harapan dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2006).

4. Masyarakat Pesisir

Menurut pendekatan geografi-budaya lingkungan sosial pesisir, secara umum mencakup kesatuan-kesatuan hidup manusia yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang relatif dekat ke laut. Dengan kata lain yang termasuk ke dalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat laut dan masyarakat yang khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut. Dalam pengertian ini komunitas perairan juga tergolong ke dalam lingkungan sosial pesisir. Bagi komunitas ini ketergantungan hidup mereka kepada sumber daya alam daratan juga sama besarnya dengan ketergantungan mereka kepada sumber daya perairan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2005).

5. Tipe Masyarakat Pesisir Indonesia

Berdasarkan hubungan, adaptasi, dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam di pesisir setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Masyarakat Perairan

Masyarakat perairan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai, atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat di suatu wilayah (teritorial) perairan tertentu.

Kehidupan sosial mereka cenderung bersifat egaliter dan hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan setingkat klan kecil.

b. Masyarakat Nelayan

Golongan masyarakat pesisir yang dapat dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya bermukim secara tetap di daerah-daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem ekonomi mereka tidak dapat lagi dikategorikan masih berada pada tingkat subsistensi, sebaliknya sudah masuk ke sistem perdagangan karena hasil laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan imbal ekonomis ke pihak-pihak lain (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2005).

6. Pangan dan Olahannya

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

a. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan.

Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, konsumsi tidak langsung yakni dengan dijadikan bahan baku pengolahan pangan.

b. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Contoh: teh manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
2. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.

c. Pangan olahan tertentu.

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contoh ekstrak tanaman mahkota dewa untuk

diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya (Saprianto, Cahyo, dan Hidayati, 2006).

7. Perencanaan Pengelolaan Daerah Pesisir

Menurut Sorensen (dalam Dahuri, 2004), perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Seringkali, keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi; pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu adanya koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan pemerintah tertentu. Keterpaduan

secara keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang relevan. Keterpaduan secara ekologis diartikan bahwa lingkungan wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem yang saling terkait, dan tidak berdiri sendiri, perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Ketiga aspek ini perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi (Dahuri, dkk, 2004).

8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai

(http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=394, 2011).

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum PMPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus PNPM Mandiri adalah:

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)

4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat

(http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=267, 2011).

Fokus PNPMM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

- a. Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan

tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat; pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat.

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal.

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam

pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program

([http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article &id=42&Itemid=269](http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=269), 2011).

Kegiatan PNPМ Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan dari program PNPМ Mandiri ini meliputi :

- a. Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals*(MDGs).
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik

([http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content &view=article &id=40&Itemid=270](http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=270), 2011).

9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

PNPM Mandiri KP dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011).

KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), penyuluh swadaya dan/atau tenaga pendamping PUGAR. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011).

PNPM Mandiri KP dalam pelaksanaannya mengikuti delapan ciri- ciri dasar PNPM Mandiri, yaitu:

- a. Mendukung tersedianya anggaran untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan masyarakat yang dicairkan langsung oleh pemerintah ke rekening lembaga yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat,
 - b. ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program,
 - c. ada tindakan untuk memperkuat pemihakan kepada kepentingan kaum perempuan dan kaum yang hampir miskin,
 - d. mendorong dan memperkuat peran dan fungsi kelembagaan yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat,
 - e. pengambilan keputusan atas pendanaan kegiatan-kegiatan melalui musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat,
 - f. masyarakat memilih dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Dana secara demokratis,
 - g. pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/kelompok masyarakat, dan
 - h. melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Pedoman Teknis PUMP bidang P2HP, 2014).
10. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil (P2HP)

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha

perikanan sesuai dengan potensi desa (PNPM-Mandiri, 2014). Tujuan pelaksanaan kegiatan PUMP-P2HP adalah tersalurkannya bantuan langsung masyarakat kepada 1.000 kelompok pengolah dan pemasar di 33 provinsi dan terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, 2013).

Pola dasar PUMP-P2HP dirancang untuk meningkatkan kemampuan kelompok pengolah dan pemasar yang terdiri dari kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk mengembangkan usaha produktif dalam rangka mendukung peningkatan produksi, pendapatan dan pengembangan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran. Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama kegiatan PUMP-P2HP adalah:

- a. keberadaan kelompok pengolah dan pemasar;
- b. keberadaan tenaga pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina, Kelompok Kerja PUMP P2HP, dan Tim Koordinasi;
- c. sosialisasi dan pelatihan;
- d. penyaluran dana BLM; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pedoman Teknis PUMP bidang P2HP, 2014).

Organisasi pelaksana PUMP-P2HP dibagi menjadi dua yaitu pada tingkat pusat yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja serta pada tingkat daerah yang terdiri atas Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping, seperti diuraikan dibawah ini.

a. Tingkat Pusat

1. Tim Koordinasi

Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pengarah membentuk Tim Koordinasi yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar lintas Kementerian/Lembaga.

Tim Koordinasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi dapat dibantu sekretariat. Tugas Tim Koordinasi adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP, melakukan sosialisasi pengembangan PNPM Mandiri KP, mengintegrasikan anggaran dan kegiatan yang mendukung kegiatan PNPM Mandiri KP, dan melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja terkait pelaksanaan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan PNPM Mandiri KP.

2. Kelompok Kerja

Pada tingkat pusat direktorat jendral (dirjen) P2HP membentuk Kelompok kerja PUMP-P2HP. Tugas kelompok kerja adalah melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

b. Tingkat Daerah

1. Tim Pembina

Untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani teknis serta instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi.

2. Tim Teknis

Dalam pelaksanaan PUMP-P2HP di Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas dengan anggota sesuai unsur-unsur yang dibutuhkan serta instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, 2013).

11. Indikator Keberhasilan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan pelaksanaan dari prioritas nasional ke-4 yaitu Penanggulangan Kemiskinan. Target yang diharapkan adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Menurut Pedoman Teknis PUMP bidang P2HP (2013), PNPM Mandiri KP telah menetapkan 7 (tujuh) kelompok indikator yang dapat diimplementasikan ke dalam indikator output pelaksanaan PUMP-P2HP. Indikator keberhasilan PUMP bidang P2HP disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator keberhasilan PUMP bidang P2HP

No	Kelompok Indikator	Nama Indikator Kinerja Output	Target
1	Pemanfaat	Jumlah kelompok	1000 Kelompok Pengolah dan Pemasar
2	Partisipasi Umum	Jumlah PPTK dan Penyuluh PNS Jumlah Anggota Kelompok yang hadir dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan.	218 PPTK/PNS 7.000 orang
3	Kualitas Output	Jumlah pertemuan/koordinasi SKPD dengan TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota Ketepatan waktu penyaluran BLM Persentase pemanfaatan BLM yang sesuai dengan RUB dan dimanfaatkan	Minimal 2 kali 1 tahun 100% bulan Desember 100%
4	Penguatan Kapasitas	Persentase jumlah anggota kelompok yang dilatih, diberikan bimtek dan/atau mengikuti temu usaha dibandingkan dengan total anggota kelompok Persentase jumlah kelompok yang dibina oleh Tenaga Pendamping dalam menyusun RUB memperhatikan RPJM Desa	10% 100%
5	Tata Kelola	Persentase kepemilikan papan informasi penerima PUMP-P2HP	100%
6	Gender	Persentase rata-rata anggota kelompok perempuan dibandingkan dengan total anggota kelompok penerima Prosentase jumlah Tenaga Pendamping, dan atau Kader Desa perempuan Prosentase jumlah kehadiran peserta perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan	10% 30% 10%
7	Dukungan Pemda	Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan	50% dari jumlah kab/kota penerima

Sumber: Pedoman Teknis PUMP bidang P2HP, 2013

12. Teori Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi kenaikan modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004).

Pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang atau aktiva lain yang masuk ke dalam perusahaan atau menurunnya kewajiban sebagai akibat penjualan barang atau penyerahan jasa.
- b. Jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual (Aliminsyah dan Padji, 2003).

Menurut Boediono (1993), untuk menghitung pendapatan bersih usahatani terlebih dahulu harus diketahui tingkat pendapatan total dan pengeluaran pada periode tertentu. Pendapatan total petani didekatidengan persamaan sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan:

TR	= <i>Total Revenue</i>	= penerimaan total pelaku usaha dibidang perikanan (Rp)
P	= <i>Price</i>	= hargapokok per kg (Rp)
Q	= <i>Quantity</i>	= jumlah produk yang dihasilkan (kg)

Pendapatan bersih petani diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π	= Pendapatan bersih
TR	= Penerimaan Total (<i>Total Revenue</i>)
TC	= TFC + TVC
TFC	= Biaya Tetap Total (<i>Total Fix Cost</i>), yaitu biaya yang tidak bertambah seiring dengan pertambahan produksi.
TVC	= Biaya Variabel Total (<i>Total Variable Cost</i>), yaitu biaya yang bertambah seiring dengan pertambahan produksi.
TC	= Biaya Total (<i>Total Cost</i>), yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sampai terciptanya barang.

Menurut Soekartawi (1995), untuk mengetahui usaha menguntungkan atau tidak secara ekonomi dapat dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan dengan biaya (*Revenue Cost Ratio*). Nisbah penerimaan dengan biaya secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R/C = PT / BT$$

Keterangan:

R/C	= Nisbah penerimaan dan biaya
PT	= Penerimaan Total (Rp)
BT	= Biaya Total (Rp)

Berikut ini merupakan kriteria pengambilan keputusan:

- Jika $R/C > 1$, maka usaha mengalami keuntungan karena penerimaan lebih besar dari biaya.
- Jika $R/C < 1$, maka usaha mengalami kerugian karena penerimaan lebih kecil dari biaya.
- Jika $R/C = 1$, maka usaha mengalami impas karena penerimaan sama dengan biaya.

13. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendapatan dan kesejahteraan nelayan dilakukan oleh Hendrik (2011) yang memilih lokasi di Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau menyimpulkan bahwa berdasarkan ukuran kriteria UMR didapatkan seluruh nelayan mempunyai pendapatan di atas UMR, berdasarkan ukuran Bappenas sebanyak 4 rumah tangga nelayan tidak sejahtera dan menurut ukuran BPS sebanyak 6 rumah tangga responden termasuk ke dalam rumah tangga tidak sejahtera.

Penelitian oleh Rahim (2011) mengenai pendapatan usaha tangkap nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berlokasi di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor per trip di wilayah pesisir Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh harga minyak tanah, produktivitas usaha tangkap, umur, dan alat tangkap jenis rawai tetap, kemudian secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama melaut, dan perbedaan wilayah penangkapan; sedangkan pendapatan usaha tangkap per tahun dipengaruhi secara positif oleh harga minyak tanah, dan produktivitas usaha tangkap, kemudian negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama melaut, trip, dan perbedaan wilayah penangkapan.

Penelitian oleh Asih dan Laapo (2009) tentang analisis pendapatan usaha perikanan tangkap dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi penyaluran dan penerimaan kredit perikanan di Kecamatan Ampana

Kotamenyimpulkan bahwa pendapatan usaha perikanan tangkap yang dijalankan oleh nelayan tradisional pada daerah Kecamatan Ampana Kota sebesar Rp 8.192.420/nelayan/tahun. Terhadap kebijakan kredit perikanan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kredit yang disalurkan dan diterima oleh nelayan dipengaruhi oleh umur, lama pendidikan, pengalaman, hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.

Penelitian oleh Primyastanto, dkk (2013) mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran nelayan payang jurung di Selat Madura menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan melaut secara statistik adalah jumlah aset kapal, daya mesin kapal, dan pengalaman melaut.

Penelitian oleh Lubis, dkk (2013) tentang analisis pendapatan dan strategi pemasaran ikan kerapu tangkap (*epinephelus tauvina*) di Kabupaten Serdang Bedagai menyimpulkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh petani ikan kerapudi Desa Tebing Tinggi sebesar Rp. 3.518.000,00 , di Desa Sialang Buah sebesar Rp. 2.803.238,00 dan di desa Sentang sebesar Rp. 2.905.525,00. Rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pedagang pengumpul ikan kerapudi daerah penelitian sebesar Rp. 40.224.479,00, pedagang eksportir ikan kerapudi daerah penelitian sebesar Rp. 1.436.895.833,- ; masalah-masalah yang sering dihadapi Pemasaran ikan kerapu oleh nelayan di daerah penelitian adalah persaingan daerah pasar ikan, harga jual yang ditetapkan oleh pedagang, promosi tidak ada,

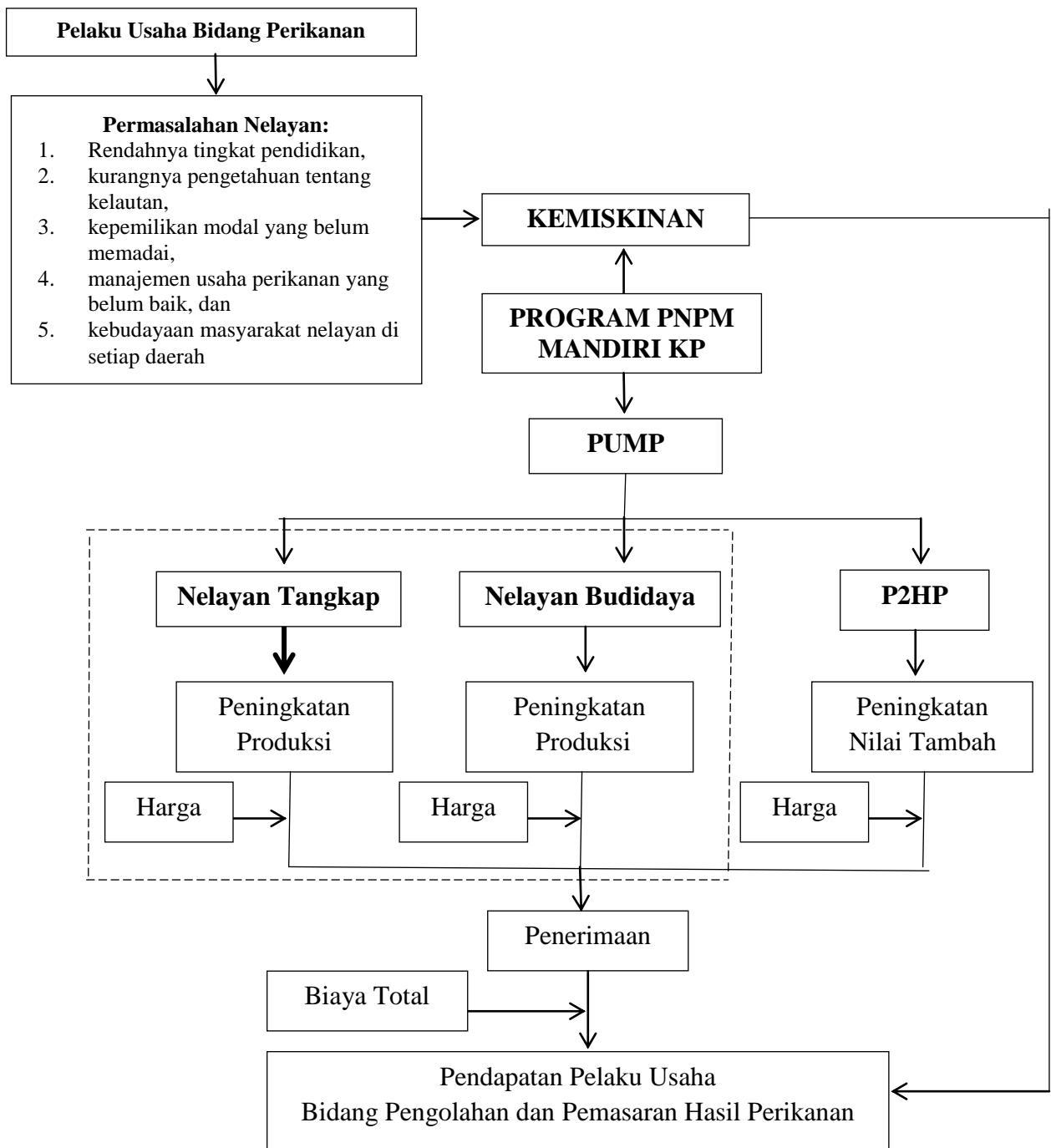
dan cuaca di laut yang tidak menentu, serta harga jual ikan yang bersaing; masalah-masalah yang dihadapi pemasaran ikan kerapu oleh pedagang di daerah penelitian adalah persaingan daerah pasar ikan, harga jual yang ditetapkan oleh daerah pengimpor, promosi yang belum maksimal dan harga jual ikan yang bersaing.

B. Kerangka Pemikiran

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis program PUMP bidang P2HP dan pendapatan pelaku usaha bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Objek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang mendapat bantuan dana pada program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Menurut Karyani (2012), permasalahan pokok pada masyarakat nelayan adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan tentang kelautan, kepemilikan modal, serta terdapat manajemen usaha perikanan, dan masyarakat pesisir cenderung memiliki ciri khas dan budaya ekonomi dari wilayah tinggal mereka masing-masing.

Masalah-masalah nelayan tersebut juga berpengaruh terhadap kemiskinan kaum nelayan, khususnya terhadap pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Untuk menangani kemiskinan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagas 3 program dibawah naungan PNPM-Mandiri, yaitu Pemberdayaan

Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), dan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Program PUMP diperuntukkan untuk 3 jenis usaha, yaitu bagi nelayan tangkap, nelayan budidaya, dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian ini mengkaji PUMP yang ditujukan untuk pelaku usaha bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. PUMP memfasilitasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dengan memberikan bantuan berupa alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memacu mereka dalam meningkatkan nilai tambah produk sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Tujuan akhir dari program PUMP bidang P2HP adalah peningkatan pendapatan masyarakat pesisir pelaku usaha bidang P2HP sehingga penerima manfaat program memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan sebelum menerima manfaat program PUMP bidang P2HP. Kerangka pemikiran tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pemikiran Keragaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Pendapatan Pelaku Usaha Bidang Perikanan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung

Keterangan:

→ : garis hubungan

⋮ : tidak diteliti

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dimuka, maka dapat diturunkan hipotesis bahwa diduga pendapatan pelaku usaha dibidang perikanan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sebelum dan setelah mengikuti program PUMP bidang P2HP berbeda.